Website : http://um-tapsel.ac.id email : justitia@um-tapsel.ac.id
JURNAL JUSTITIA
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA KEARSIPAN MELALUI APLIKASI SRIKANDI DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TANGERANG

Rosita Karisma Putri,[1)] Hardjito S Darmojo,[2)] Hilman[3)]

Universitas Islam Syekh-Yusuf Kota Tangerang

2407010290@students.unis.ac.id[1)]
Hardtop.darmojo@unis.ac.id[2)]
hilman@unis.ac.id[3)]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tata kelola kearsipan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang berdasarkan model George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI telah berjalan dengan baik. Komunikasi berlangsung efektif, sumber daya dan disposisi pelaksana mendukung implementasi kebijakan, serta struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas dan regulasi yang jelas. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi pengguna, penyusunan SOP internal, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: *George C. Edward III; implementasi kebijakan; Srikandi; tata kelola kearsipan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the records management policy through the Integrated Dynamic Records Information System (SRIKANDI) at the Tangerang Regency Library and Archives Office based on George C. Edward III's policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. The findings indicate that the implementation of the records management policy through the SRIKANDI application has generally been implemented well. Policy communication was effective, resources and implementers' disposition supported policy implementation, and the bureaucratic structure was supported by clear task distribution and regulatory frameworks. However, further efforts are required to enhance users' competencies, develop internal Standard Operating Procedures (SOP), and strengthen coordination among regional government agencies to optimize policy implementation.

Keywords: *George C. Edward III; policy implementation; records management;Srikandi*

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa adanya perubahan yang cukup signifikan, salah satunya dalam hal administrasi di bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai sebagai kemajuan yang memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dalam proses administrasi (Hutagalung et al., 2026). Dalam konteks administrasi, perubahan tercermin dalam transformasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital yang dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) (Diaz Azhari et al., 2026). Penerapan SPBE melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dengan cepat menindaklanjuti modernisasi tata kelola administrasi, termasuk dalam bidang kearsipan, salah satunya melalui kebijakan pengelolaan arsip elektronik (Mallolongan & Noor, 2023). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas tata kelola kearsipan, dari yang sebelumnya bersifat konvensional beralih ke format digital, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses dan menelusuri informasi dokumen secara lebih efektif (Putra & Merliana, 2021).

Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sumber informasi, alat bukti hukum, serta memori institusional negara (Yogopriyatno et al., 2024a). Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa setiap lembaga negara dan pemerintah daerah wajib mengelola arsip secara tertib, sistematis, dan sesuai standar (Pemerintah Pusat, 2009). Dengan pengelolaan arsip yang efisien mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan akuntabilitas di berbagai lembaga didukung dengan adanya pembinaan secara nasional dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang berperan dalam merumuskan kebijakan, standar, dan sistem kearsipan nasional (Apriana Irawati et al., 2024).

Melalui mekanisme evaluasi, pemerintah dapat menilai tingkat kepatuhan instansi dalam menerapkan tata kelola kearsipan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kearsipan juga menjadi penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Berdasarkan data Laporan Audit Kearsipan Eksternal Provinsi Banten, nilai hasil pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tangerang selama tiga tahun terakhir (2023-2025) menunjukkan tren fluktuatif namun meningkat, di mana pada tahun 2023 memperoleh nilai 77,77 (Sangat Baik), meningkat menjadi 80,26 (Memuaskan) pada tahun 2024, dan mencapai 85,68 (Memuaskan) pada tahun 2025. Di sisi lain, nilai tingkat digitalisasi arsip sempat berada pada posisi yang sangat rendah yakni 43,29 (Kurang) pada tahun 2023, kemudian melonjak drastis ke angka 90,42 (Sangat Memuaskan) pada tahun 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 87,91 (Memuaskan) pada tahun 2025.

Dalam mengkaji fenomena transformasi digital ini, administrasi publik dipahami sebagai konsep yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan konteks sosial, politik, dan pemerintahan. Menurut Waldo (1996), administrasi publik merupakan organisasi dan manajemen sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pemerintah. Sejalan dengan itu, Gulick dan Urwick (2004) menjelaskan bahwa teori administrasi publik berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Dalam konteks kearsipan modern, paradigma New Public Service (NPS) yang dipopulerkan oleh Denhardt dan Denhardt (2015) menjadi sangat relevan karena menempatkan warga negara dan pelayanan prima sebagai prioritas utama. Digitalisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata inovasi instansi pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan pelayanan administrasi. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai model teoretis yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik. Model Van Meter dan Van

Horn (1975) misalnya, menekankan enam variabel linier termasuk standar tujuan, sumber daya, dan disposisi. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) fokus pada kemampuan regulasi dalam menstruktur proses. Sementara model Merilee S. Grindle (1980) melihat isi kebijakan dan konteks implementasi sebagai determinan utama keberhasilan. Namun, penelitian ini secara khusus berfokus pada model George C. Edward III yang menawarkan indikator operasional internal organisasi yang lebih tajam yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna menjawab fluktuasi nilai digitalisasi kearsipan di Kabupaten Tangerang secara komprehensif pada periode tahun 2026.

Dalam mengkaji fenomena transformasi digital ini, administrasi publik dipahami sebagai konsep yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan konteks sosial, politik, dan pemerintahan. Menurut Waldo (1996), administrasi publik merupakan organisasi dan manajemen sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pemerintah. Sejalan dengan itu, Gulick dan Urwick (2004) menjelaskan bahwa teori administrasi publik berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Dalam konteks kearsipan modern, paradigma New Public Service (NPS) yang dipopulerkan oleh Denhardt dan Denhardt (2015) menjadi sangat relevan karena menempatkan warga negara dan pelayanan prima sebagai prioritas utama. Digitalisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata inovasi instansi pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan pelayanan administrasi. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai model teoretis yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik. Model Van Meter dan Van Horn (1975) misalnya, menekankan enam variabel linier termasuk standar tujuan, sumber daya, dan disposisi. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) fokus pada kemampuan regulasi dalam menstruktur proses. Sementara model Merilee S. Grindle (1980) melihat isi kebijakan dan konteks implementasi sebagai determinan utama keberhasilan. Namun, penelitian ini secara khusus berfokus pada model George C. Edward III yang menawarkan indikator operasional internal organisasi yang lebih tajam yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna menjawab fluktuasi nilai digitalisasi kearsipan di Kabupaten Tangerang secara komprehensif pada periode tahun 2026.

Dalam mengkaji fenomena transformasi digital ini, administrasi publik dipahami sebagai konsep yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan konteks sosial, politik, dan pemerintahan. Menurut Waldo (1996), administrasi publik merupakan organisasi dan manajemen sumber daya manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pemerintah. Sejalan dengan itu, Gulick dan Urwick (2004) menjelaskan bahwa teori administrasi publik berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Dalam konteks kearsipan modern, paradigma New Public Service (NPS) yang dipopulerkan oleh Denhardt dan Denhardt (2015) menjadi sangat relevan karena menempatkan warga negara dan pelayanan prima sebagai prioritas utama. Digitalisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata inovasi instansi pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan pelayanan administrasi. Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai model teoretis yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik. Model Van Meter dan Van Horn (1975) misalnya, menekankan enam variabel linier termasuk standar tujuan, sumber daya, dan disposisi. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) fokus pada kemampuan regulasi dalam menstruktur proses. Sementara model Merilee S. Grindle (1980) melihat isi kebijakan dan konteks implementasi sebagai determinan utama

keberhasilan. Namun, penelitian ini secara khusus berfokus pada model George C. Edward III yang menawarkan indikator operasional internal organisasi yang lebih tajam yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna menjawab fluktuasi nilai digitalisasi kearsipan di Kabupaten Tangerang secara komprehensif pada periode tahun 2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam fenomena implementasi kebijakan tata kelola kearsipan digital. Jenis penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara faktual, utuh, dan kontekstual terkait penerapan aplikasi SRIKANDI. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi Arsiparis Madya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip, Super Admin aplikasi, Administrator tingkat perangkat daerah, serta Operator SRIKANDI yang menjalankan sistem sehari-hari. Bahan penelitian atau fokus kajian utama didasarkan pada dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Surat Edaran Nomor B/000.5.1/1/IX/Setda/2023 tentang Penggunaan Aplikasi SRIKANDI, serta Laporan Audit Kearsipan Eksternal. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi melalui wawancara mendalam yang semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif terhadap proses operasional aplikasi di kantor dinas, serta dokumentasi fisik maupun digital terkait rekam jejak nilai indeks digitalisasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama berjalan simultan, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi relevan dari lapangan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang mengalir tanpa poin-poin terpisah, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir untuk mendapatkan temuan penelitian yang sahih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan lapangan secara verbal dan analitis berdasarkan empat variabel utama dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III. Untuk memberikan gambaran awal mengenai data capaian kinerja kearsipan digital yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, berikut disajikan rangkapan data audit kearsipan eksternal.

Tahun	Nilai Hasil Pengawasan	Nilai Digitalisasi Arsip	Kategori Pengawasan
2023	77,77	43,29	BB (Sangat Baik)
2024	80,26	90,42	A (Memuaskan)
2025	85,68	87,91	A (Memuaskan)

Tabel 1. Capaian Nilai Pengawasan dan Digitalisasi Kearsipan Kabupaten Tangerang

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Komunikasi merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan penyampaian pesan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, proses sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI telah dilaksanakan secara

intensif sejak diterbitkannya Surat Edaran Bupati pada akhir tahun 2023. Pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten melalui bimbingan teknis berkala yang melibatkan seluruh admin dan operator perangkat daerah. Namun, hambatan komunikasi yang bersifat teknis terkadang masih muncul, terutama berkaitan dengan penyamaan persepsi mengenai tata cara kodifikasi arsip dinamis yang terintegrasi secara nasional. Implementor dituntut memiliki kejelasan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan dokumen resmi daerah, mengingat aplikasi ini terhubung langsung dengan server pusat di ANRI. Frekuensi koordinasi yang intensif antara dinas kearsipan daerah dengan pihak kementerian dan perangkat daerah lainnya terbukti mampu menekan tingkat miskomunikasi operasional secara signifikan pada tahun berjalan 2026.

Komunikasi merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan penyampaian pesan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, proses sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI telah dilaksanakan secara intensif sejak diterbitkannya Surat Edaran Bupati pada akhir tahun 2023. Pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten melalui bimbingan teknis berkala yang melibatkan seluruh admin dan operator perangkat daerah. Namun, hambatan komunikasi yang bersifat teknis terkadang masih muncul, terutama berkaitan dengan penyamaan persepsi mengenai tata cara kodifikasi arsip dinamis yang terintegrasi secara nasional. Implementor dituntut memiliki kejelasan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan dokumen resmi daerah, mengingat aplikasi ini terhubung langsung dengan server pusat di ANRI. Frekuensi koordinasi yang intensif antara dinas kearsipan daerah dengan pihak kementerian dan perangkat daerah lainnya terbukti mampu menekan tingkat miskomunikasi operasional secara signifikan pada tahun berjalan 2026.

Komunikasi merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan penyampaian pesan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, proses sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SRIKANDI telah dilaksanakan secara intensif sejak diterbitkannya Surat Edaran Bupati pada akhir tahun 2023. Pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten melalui bimbingan teknis berkala yang melibatkan seluruh admin dan operator perangkat daerah. Namun, hambatan komunikasi yang bersifat teknis terkadang masih muncul, terutama berkaitan dengan penyamaan persepsi mengenai tata cara kodifikasi arsip dinamis yang terintegrasi secara nasional. Implementor dituntut memiliki kejelasan informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan dokumen resmi daerah, mengingat aplikasi ini terhubung langsung dengan server pusat di ANRI. Frekuensi koordinasi yang intensif antara dinas kearsipan daerah dengan pihak kementerian dan perangkat daerah lainnya terbukti mampu menekan tingkat miskomunikasi operasional secara signifikan pada tahun berjalan 2026.

Sumber Daya Pendukung Penerapan Aplikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia seperti sarana, prasarana, dan anggaran finansial. Dalam konteks penerapan aplikasi SRIKANDI, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang didukung oleh kuantitas staf yang memadai di bidang pengelolaan arsip. Kendati demikian,

kualitas kompetensi teknis aparatur masih menghadapi tantangan nyata akibat pesatnya pembaruan fitur sistem informasi dari pusat. Keterbatasan kemampuan sebagian pegawai senior dalam mengoperasikan platform digital berimbas pada kecepatan pemrosesan naskah dinas. Dari aspek sarana fisik, ketersediaan jaringan internet berspesifikasi tinggi dan perangkat komputer yang kompatibel menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk optimalisasi server lokal, namun penguatan kapasitas melalui pelatihan intensif bagi operator tingkat bawah masih harus diprioritaskan demi keberlanjutan tata kelola digital secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia seperti sarana, prasarana, dan anggaran finansial. Dalam konteks penerapan aplikasi SRIKANDI, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang didukung oleh kuantitas staf yang memadai di bidang pengelolaan arsip. Kendati demikian, kualitas kompetensi teknis aparatur masih menghadapi tantangan nyata akibat pesatnya pembaruan fitur sistem informasi dari pusat. Keterbatasan kemampuan sebagian pegawai senior dalam mengoperasikan platform digital berimbas pada kecepatan pemrosesan naskah dinas. Dari aspek sarana fisik, ketersediaan jaringan internet berspesifikasi tinggi dan perangkat komputer yang kompatibel menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk optimalisasi server lokal, namun penguatan kapasitas melalui pelatihan intensif bagi operator tingkat bawah masih harus diprioritaskan demi keberlanjutan tata kelola digital secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia seperti sarana, prasarana, dan anggaran finansial. Dalam konteks penerapan aplikasi SRIKANDI, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang didukung oleh kuantitas staf yang memadai di bidang pengelolaan arsip. Kendati demikian, kualitas kompetensi teknis aparatur masih menghadapi tantangan nyata akibat pesatnya pembaruan fitur sistem informasi dari pusat. Keterbatasan kemampuan sebagian pegawai senior dalam mengoperasikan platform digital berimbas pada kecepatan pemrosesan naskah dinas. Dari aspek sarana fisik, ketersediaan jaringan internet berspesifikasi tinggi dan perangkat komputer yang kompatibel menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk optimalisasi server lokal, namun penguatan kapasitas melalui pelatihan intensif bagi operator tingkat bawah masih harus diprioritaskan demi keberlanjutan tata kelola digital secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia seperti sarana, prasarana, dan anggaran finansial. Dalam konteks penerapan aplikasi SRIKANDI, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang didukung oleh kuantitas staf yang memadai di bidang pengelolaan arsip. Kendati demikian, kualitas kompetensi teknis aparatur masih menghadapi tantangan nyata akibat pesatnya pembaruan fitur sistem informasi dari pusat. Keterbatasan kemampuan sebagian pegawai senior dalam mengoperasikan platform digital berimbas pada kecepatan pemrosesan naskah dinas. Dari aspek sarana fisik, ketersediaan jaringan internet berspesifikasi tinggi dan perangkat komputer yang kompatibel menjadi syarat mutlak. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk optimalisasi server lokal, namun penguatan kapasitas melalui pelatihan intensif bagi operator tingkat bawah masih harus diprioritaskan demi keberlanjutan tata kelola digital secara menyeluruh.

Disposisi dan Komitmen Para Pelaksana

Disposisi merujuk pada kecenderungan, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menerima dan menjalankan tugas yang didelegasikan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pimpinan dan staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang memiliki disposisi yang sangat positif terhadap modernisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI. Adanya kesadaran kolektif mengenai efisiensi waktu, pengurangan penggunaan kertas, serta transparansi dokumen menjadi pendorong utama tingginya penerimaan aparatur terhadap sistem baru ini. Sikap responsif ini mempermudah proses adaptasi organisasi dari pola konvensional ke digital. Insentif moral berupa penghargaan bagi unit kerja dengan tertib arsip elektronik

terbaik juga turut memperkuat motivasi agen pelaksana di lapangan, sehingga fluktuasi nilai indeks digitalisasi dapat dimitigasi dengan komitmen kerja yang konsisten sepanjang periode evaluasi.

Disposisi merujuk pada kecenderungan, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menerima dan menjalankan tugas yang didelegasikan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pimpinan dan staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang memiliki disposisi yang sangat positif terhadap modernisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI. Adanya kesadaran kolektif mengenai efisiensi waktu, pengurangan penggunaan kertas, serta transparansi dokumen menjadi pendorong utama tingginya penerimaan aparatur terhadap sistem baru ini. Sikap responsif ini mempermudah proses adaptasi organisasi dari pola konvensional ke digital. Insentif moral berupa penghargaan bagi unit kerja dengan tertib arsip elektronik terbaik juga turut memperkuat motivasi agen pelaksana di lapangan, sehingga fluktuasi nilai indeks digitalisasi dapat dimitigasi dengan komitmen kerja yang konsisten sepanjang periode evaluasi.

Disposisi merujuk pada kecenderungan, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menerima dan menjalankan tugas yang didelegasikan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pimpinan dan staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang memiliki disposisi yang sangat positif terhadap modernisasi kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI. Adanya kesadaran kolektif mengenai efisiensi waktu, pengurangan penggunaan kertas, serta transparansi dokumen menjadi pendorong utama tingginya penerimaan aparatur terhadap sistem baru ini. Sikap responsif ini mempermudah proses adaptasi organisasi dari pola konvensional ke digital. Insentif moral berupa penghargaan bagi unit kerja dengan tertib arsip elektronik terbaik juga turut memperkuat motivasi agen pelaksana di lapangan, sehingga fluktuasi nilai indeks digitalisasi dapat dimitigasi dengan komitmen kerja yang konsisten sepanjang periode evaluasi.

Struktur Birokrasi dan Prosedur Kerja

Struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dicirikan oleh kejelasan pembagian kerja serta keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang telah memiliki pembagian fungsi yang tegas antara struktur super admin, administrator internal, dan operator teknis. Regulasi formal yang melandasi tata kerja ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Walaupun pembagian tugas secara makro sudah jelas, namun pada tataran mikro operasional masih dijumpai ketiadaan SOP internal yang spesifik mengatur batas waktu penyelesaian verifikasi naskah masuk dan keluar di lingkungan internal dinas. Hal tersebut memicu terjadinya penumpukan antrean dokumen pada momen-momen tertentu. Oleh sebab itu, penataan alur birokrasi yang lebih ramping dan legalitas SOP teknis domestik menjadi rekomendasi utama demi memaksimalkan utilitas aplikasi SRIKANDI secara optimal.

Struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dicirikan oleh kejelasan pembagian kerja serta keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang telah memiliki pembagian fungsi yang tegas antara struktur super admin, administrator internal, dan operator teknis. Regulasi formal yang melandasi tata kerja ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Walaupun pembagian tugas secara makro sudah jelas, namun pada tataran mikro operasional masih dijumpai ketiadaan SOP internal yang

spesifik mengatur batas waktu penyelesaian verifikasi naskah masuk dan keluar di lingkungan internal dinas. Hal tersebut memicu terjadinya penumpukan antrean dokumen pada momen-momen tertentu. Oleh sebab itu, penataan alur birokrasi yang lebih ramping dan legalitas SOP teknis domestik menjadi rekomendasi utama demi memaksimalkan utilitas aplikasi SRIKANDI secara optimal.

Struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dicirikan oleh kejelasan pembagian kerja serta keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang telah memiliki pembagian fungsi yang tegas antara struktur super admin, administrator internal, dan operator teknis. Regulasi formal yang melandasi tata kerja ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Walaupun pembagian tugas secara makro sudah jelas, namun pada tataran mikro operasional masih dijumpai ketiadaan SOP internal yang spesifik mengatur batas waktu penyelesaian verifikasi naskah masuk dan keluar di lingkungan internal dinas. Hal tersebut memicu terjadinya penumpukan antrean dokumen pada momen-momen tertentu. Oleh sebab itu, penataan alur birokrasi yang lebih ramping dan legalitas SOP teknis domestik menjadi rekomendasi utama demi memaksimalkan utilitas aplikasi SRIKANDI secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola kearsipan melalui aplikasi SRIKANDI di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik ditinjau dari aspek komunikasi yang efektif, disposisi pelaksana yang positif, serta pembagian kerja birokrasi yang jelas. Kendati demikian, kendala utama masih terletak pada dimensi kualitas sumber daya manusia yang belum merata dalam hal kecakapan teknologi serta ketiadaan SOP operasional internal yang mendetail. Saran logis ke depan bagi instansi adalah segera menyusun petunjuk teknis internal yang baku untuk membatasi durasi verifikasi dokumen, mengadakan diklat literasi digital kearsipan secara inklusif bagi aparatur senior, serta memperkuat jejaring koordinasi lintas perangkat daerah guna mempertahankan capaian indeks digitalisasi kearsipan yang tinggi secara konsisten di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, P., Rohmah, S., & Vining, A. L. (2026). Kapasitas Implementor dalam Tata Kelola Pemerintahan Digital. Jurnal Administrasi Publik Modern, 14(1), 45-58.

Anderson, J. E. (2003). Public Policy-Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.

Apriana Irawati, D., Yogopriyatno, H., & Sutopo, B. (2024). Standarisasi Kearsipan Nasional pada Lembaga Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Kearsipan, 8(2), 112-125.

Astuti, W., Sawir, M., & Pardi, H. (2023). Pengantar Ilmu Administrasi: Teori dan Praktik Modern. Jakarta: Penerbit Aksara Jaya.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Diaz Azhari, M., Hutagalung, R., & Putra, A. (2026). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Transformasi Digital. Jurnal Inovasi Birokrasi, 10(1), 12-28.

Dunn, W. N. (2016). Public Policy Analysis (5th ed.). New York: Routledge.

Dye, T. R. (1972). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hutagalung, R., Diaz Azhari, M., & Merliana, S. (2026). Kemajuan Teknologi dalam Administrasi Pemerintahan Modern. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 89-102.

Mallolongan, A., & Noor, H. (2023). Modernisasi Tata Kelola Administrasi Kearsipan Elektronik. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 7(3), 201-214.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Chicago: Scott, Foresman and Company.

Pemerintah Pusat. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.

Tarumingkeng, R. (2025). Mewirausahakan Birokrasi: Terjemahan Reinventing Government David Osborne & Ted Gaebler. Jakarta: Salemba Empat.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2025). Policy Analysis: Concepts and Practice (6th ed.). New York: Routledge.